

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Hutan lindung berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 kawasan hutan lindung ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria yaitu, kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih; kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut; atau kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan kelerengan diatas lebih dari 15% (lima belas persen). Salah satu kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan pada wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah hutan lindung dengan tipe ekosistem rawa gambut.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Sungai Beram Hitam merupakan Unit KPH yang terdapat di Provinsi Jambi, yang penetapan wilayahnya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 77/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010. Wilayah kerja KPHL Model Sungai Beram Hitam merupakan kawasan hutan gambut yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan luasan  $\pm 15.050$  ha. Namun, dari luasan 15.050 ha tersebut terdapat 5.000 ha kawasan yang telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan perkebunan masyarakat. Alih fungsi sebagian kawasan Hutan Lindung Gambut (HLG) oleh masyarakat tersebut terjadi karena meningkatnya kebutuhan akan lahan garapan (KPHL, 2017).

Alih fungsi kawasan HLG mengakibatkan kerusakan pada fungsi lindung kawasan. Disamping itu, kegiatan alih fungsi cenderung mengurangi penutupan lahan yang luasannya terus meningkat (Yuniati *et al.*, 2018). Adapun salah satu program yang diterapkan oleh KPHL Model Sungai Beram Hitam untuk mengatasi persoalan tersebut adalah melalui program perhutanan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Program pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh KPHL Model Sungai Beram Hitam adalah hutan kemasyarakatan melalui pengembangan agroforestri. Hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat (KemenLHK, 2016). Pengembangan agroforestri yang dilakukan menerapkan struktur tegakan tanaman menyerupai kondisi hutan pada umumnya, dengan simulasi strata tajuk atas berupa tanaman jelutung (*Dyera lowii*) dan strata tajuk menengah dengan jenis tanaman pinang (*Areca catechu*) serta sawit (*Elaeis* sp.). Untuk pola agroforestri yang diterapkan pada kawasan HLG Sungai Beram Hitam adalah pola baris berselang-seling (*alternate rows*). Program hutan kemasyarakatan yang dilakukan oleh KPHL Sungai Beram Hitam sudah dimulai sejak tahun 2011. Terdapat 6 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang telah dibentuk, namun pada saat penelitian berlangsung hanya terdapat 3 KTH yang masih aktif diantaranya adalah KTH Jelutung Mutiara, Saren Jaya serta Pattiro Jaya (KPHL, 2017).

Pengembangan agroforestri dinilai dapat menjadi solusi yang efektif karena dapat menyeimbangkan akses kelola lahan bagi masyarakat dan kelestarian hutan (Suharjito *et al.*, 2003). Selain itu, agroforestri juga dapat mencegah perluasan tanah terdegradasi dan melestarikan sumberdaya hutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengembangan agroforestri sangat penting untuk menjaga kelestarian hutan dan juga pemenuhan kebutuhan masyarakat (Wulandari *et al.*, 2014). Menurut penelitian Kholifah *et al.*, (2017) yang dilakukan di Kelurahan Sumber Agung, Bandar Lampung, menyatakan bahwa kontribusi agroforestri terhadap pendapatan petani sebesar 98,47%. Namun dalam beberapa kasus yang terjadi di lapangan ternyata masih terdapat program pemberdayaan yang telah

berjalan akan tetapi tidak diiringi dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Rendahnya tingkat partisipasi tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat mengenai program yang sedang dijalankan. Hal tersebut tentu dapat mempengaruhi keberlanjutan program yang telah terbentuk.

Pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan sangat penting dalam upaya menjaga kelestarian hutan, dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dapat membatasi penggunaan hasil hutan maupun bahaya yang ditimbulkan akibat dari kerusakan hutan yang terjadi (Tinambunan, 2011). Pengetahuan seseorang berkaitan dengan pemahaman yang dimilikinya, jika pengetahuan seseorang tinggi maka semakin baik juga dalam menilai serta memahami sesuatu (Heryatna *et al.*, 2015). Hal ini sejalan dengan penelitian Ningtyas (2015) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang maka akan semakin tinggi pula persepsi positifnya terhadap objek tertentu.

Pengetahuan seseorang dapat diperoleh melalui pendidikan formal dan nonformal, dimana dengan pendidikan yang tinggi maka diharapkan akan semakin luas juga pengetahuannya. Namun tidak berarti seseorang dengan pendidikan rendah mutlak berpengetahuan rendah pula. Mengingat bahwa peningkatan pengetahuan tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal, tetapi dapat diperoleh juga dari pendidikan non formal dan keterbukaan masyarakat dalam mencari atau menerima informasi baru (Suraimah *et al.*, 2019). Menurut Wawan dan Dewi (2010) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat yang terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi umur, pendidikan, pekerjaan serta minat, sedangkan untuk faktor eksternal sendiri terdiri dari sumber informasi.

Berdasarkan uraian diatas yang mengungkapkan bahwa pengetahuan merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan pemahaman seseorang mengenai suatu objek dan juga sebagai faktor pendukung yang sangat menunjang dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang baik serta tetap lestari, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengetahuan Kelompok Tani Hutan dalam Pengelolaan Agroforestri di Kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Beram Hitam”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Alih fungsi yang dilakukan oleh masyarakat pada kawasan HLG Sungai Beram Hitam memberikan dampak buruk bagi kawasan lindung, untuk mengatasi hal tersebut maka sejak tahun 2011 pihak KPHL membentuk program hutan kemasyarakatan (HKm) dengan pengembangan agroforestri yang dikelola oleh 3 KTH. Dengan adanya program tersebut, selain memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengelola hutan pengembangan agroforestri juga diharapkan dapat memperbaiki fungsi lindung kawasan agar kelestarian HLG tetap terjaga. Pengembangan agroforestri yang dilakukan tidak terlepas dari pengetahuan yang dimiliki oleh KTH sebagai pengelola program tersebut, yang nantinya akan mempengaruhi keberlanjutan serta keberhasilan pengelolaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Hudin (2010) yang menyatakan bahwa penggunaan sumberdaya hutan oleh masyarakat yang tinggal disekitarnya sangat tergantung pada pengetahuan dan kemampuan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Nehe (2018) di Desa Sembahe Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, pengetahuan masyarakat dalam mengelola agroforestri dapat ditinjau dari aspek pengetahuan agroforestri secara umum, kondisi lingkungan, persiapan lahan, persiapan bibit, penanaman dan pemeliharaan serta pemanenan. Saputra *et al.*, (2015) menyatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan mempengaruhi pandangannya mengenai suatu hal atau objek tertentu. Jika pengetahuan seseorang semakin tinggi maka pandangan seseorang tersebut dalam menilai sesuatu akan semakin baik. Tingkat pengetahuan seseorang terhadap pengelolaan hutan merupakan faktor pendukung yang sangat menunjang dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang baik serta tetap terjaga kelestariannya (Amal dan Baharuddin, 2016). Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan kelompok tani hutan dalam pengelolaan agroforestri di kawasan HLG Sungai Beram Hitam?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan kelompok tani hutan dalam mengelola agroforestri?

3. Bagaimana deskripsi pengaruh faktor yang diuji terhadap tingkat pengetahuan kelompok tani hutan dalam mengelola agroforestri?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengetahuan kelompok tani hutan dalam pengelolaan agroforestri di kawasan HLG Sungai Beram Hitam.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan kelompok tani hutan dalam mengelola agroforestri.
3. Mendeskripsikan pengaruh faktor yang diuji terhadap tingkat pengetahuan kelompok tani hutan dalam mengelola agroforestri.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan informasi dasar mengenai tingkat pengetahuan kelompok tani hutan dalam pengelolaan agroforestri di kawasan HLG Sungai Beram Hitam.
2. Menjadi rujukan awal bagi penelitian lanjutan yang sesuai dengan topik penelitian ini.